
**PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN ARUS KAS
MENGUNAKAN METODE *DIRECT CASH FLOW*
(STUDI KASUS : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI LAMPUNG)**

¹Cici Dian Paramita, ²Dedi Darwis, ³Ikbal Yasin, ⁴Heni Sulistiani

^{1,2,3,4}Program Studi Sistem Informasi Akuntansi,

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia

Email: ¹cicidianparamita@gmail.com, ²darwisdedi@teknokrat.ac.id, ³ikbalyasin@teknokrat.ac.id,

⁴henisulistiani@teknokrat.ac.id

ABSTRAK

Keyword:

Cash flow

Finance

Financial report

The study, entitled Accounting Information Systems Cash Flow Control Direct Cash Flow Method (Case Study: National Unity and Political Agency of Lampung Province) in the process of controlling the flow of funds in the finances of the National Unity and Political Agency of Lampung Province found problems including the recording process on the finance department uses a ledger (manual recording). Using the ledger (recording) causes the recording to be less effective and also takes a long time. This study aims to facilitate the finance department in the process of managing funds. Data collection techniques include observation, interviews, documentation, and literature review. The system development method used in this research is the Prototype method using UML (Unified Modeling Language) as a tool to analyze the system to be made including Use Case Diagrams, Activity Diagrams and Class Diagrams. The development of this system uses the PHP programming language, Codeigniter framework version 3.1, Sublime as a Text editor version 3.1.1 (64 bit), and MySQL database version 11.11 (64 bit) as a database management system. The results of this study are able to build web-based applications and can manage financial transactions and present financial reports quickly and well, which has been tested by Blackbox and obtained a percentage with a value of 100%, and results that the system can run according to user needs and is feasible to use workable.

Corresponding Author:

Dedi Darwis,

Program Studi Sistem Informasi Akuntansi,

Universitas Teknokrat Indonesia,

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No 9-11 Labuhan Ratu, Bandar Lampung.

Email: darwisdedi@teknokrat.ac.id

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awalnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung bernama Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung, yang merupakan hasil dari penggabungan Kantor Direktorat Sosial Politik dengan Markas Wilayah Pertahanan Sipil, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Dalam Peraturan Daerah dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah [1].

Wilayah kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung bergerak dalam Wilayah kerja yang begitu besar dan kompleks, yaitu bergerak di bidang penguatan Ideologi, Politik,

Ekonomi, Sosial dan Budaya (IPOLEKSOSBUD). Terlebih pada era reformasi nasional yang mengarah kepada iklim demokratisasi tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa telah membawa perubahan signifikan, utamanya perubahan dalam paradigma pemerintahan, yaitu dari pola sentralisasi, bergeser ke pola desentralisasi, yang berimplikasi pula pada perubahan peran Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung, yang harus makin responsive terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang makin demokratis [2].

Perubahan mendasar dalam paradigma pemerintahan tersebut salah satunya adalah penyerahan urusan/kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan disamping memberikan harapan secara faktual juga menimbulkan ekspektasi dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertarikan masyarakat yang harus diantisipasi dengan kinerja pemerintah yang mempunyai visi, misi dan strategi yang terintegrasi dan dalam hal pelaporan keuangan dalam memproses transaksi pengajuan dana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Lampung masih memproses transaksi secara manual maka dari itu dapat menghambat proses transaksi yang dapat menimbulkan kekeliruan dalam pencatatan dan bisa menimbulkan hilangnya data-data. bagi instansi sangat diperlukan khusus pencatatan yang sesuai dengan sistem informasi akuntansi [3].

Peranan Sistem Informasi Akuntansi sangat penting bagi kantor kedinasan, karena dapat mempermudah proses transaksi dalam pencatatan keuangan yang dijalankan saat ini. Salah satunya yang perlu diterapkan adalah Sistem Informasi Akuntansi Pengendalian Arus Kas. (Rudianto, 2013) menyatakan suatu laporan yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas serta perubahan bersih pada kas yang berasal dari aktifitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan selama satu periode tertentu dan juga merupakan suatu format yang merekonsiliasikan saldo kas awal dan saldo kas akhir [4].

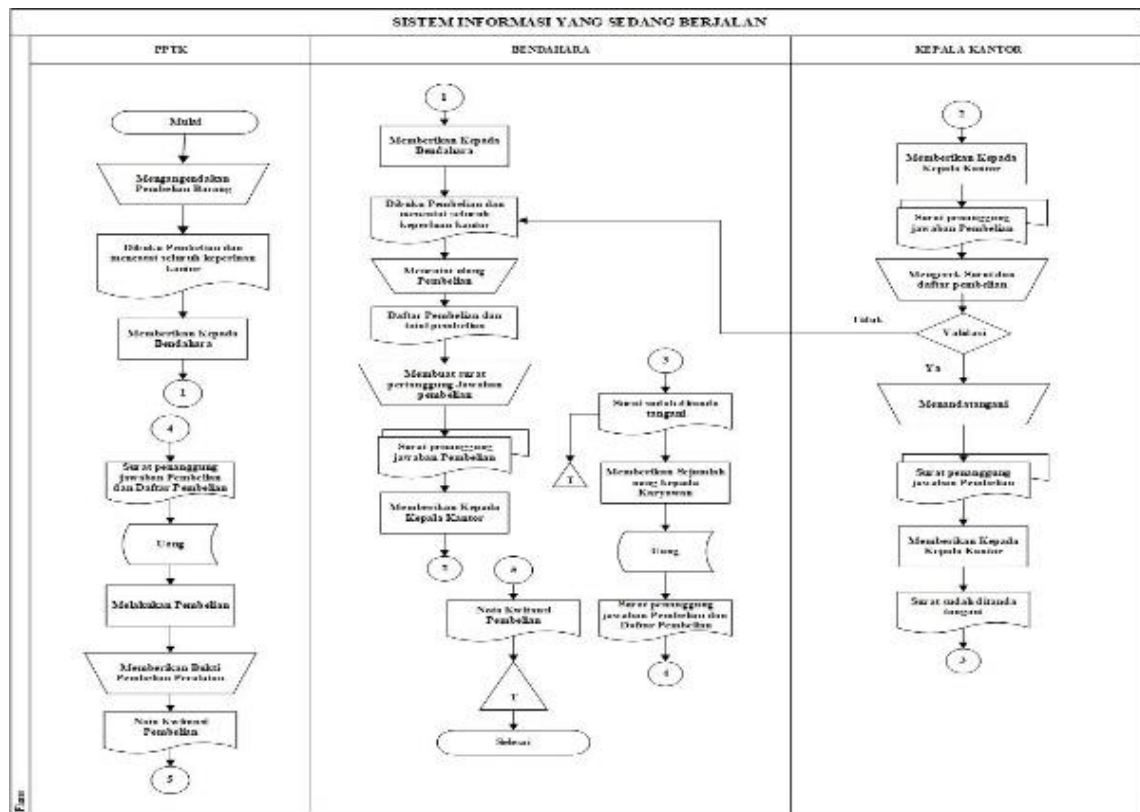
Maka pihak kantor harus menyajikan laporan keuangan tentang arus kas secara lengkap dan menggambarkan kantor tersebut yang sebenarnya. laporan keuangan yang dibutuhkan yakni bukti pencatatan saat pengeluaran dana saat proses pengajuan dana berlangsung. maka laporan mengenai arus kas sebaiknya disertakan, seperti hal Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.2 paragraf 3, (2015) menyatakan: “Jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan yang lain, laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu kas dalam rangka adaptasi dengan keadaan dan peluang. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dan arus kas masa depan (*future cash flows*) dari berbagai perusahaan. Informasi tersebut juga meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama”. Masalah yang dihadapi kantor kesbangpol saat ini masih sulitnya proses pengajuan dana karena transaksi yang dilakukan masih kurang efektif dan dapat menimbulkan kekeliruan saat transaksi dilakukan [5].

Karena pentingnya laporan arus kas, maka penulis berperan serta dalam kegiatan penyusunan laporan arus kas pengajuan dana di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung guna meningkatkan kinerja di kantor di bidang akuntansi [6].

2. METODE PENELITIAN

2.1. Bagan Alir Dokumen (BAD) Sistem yang Berjalan

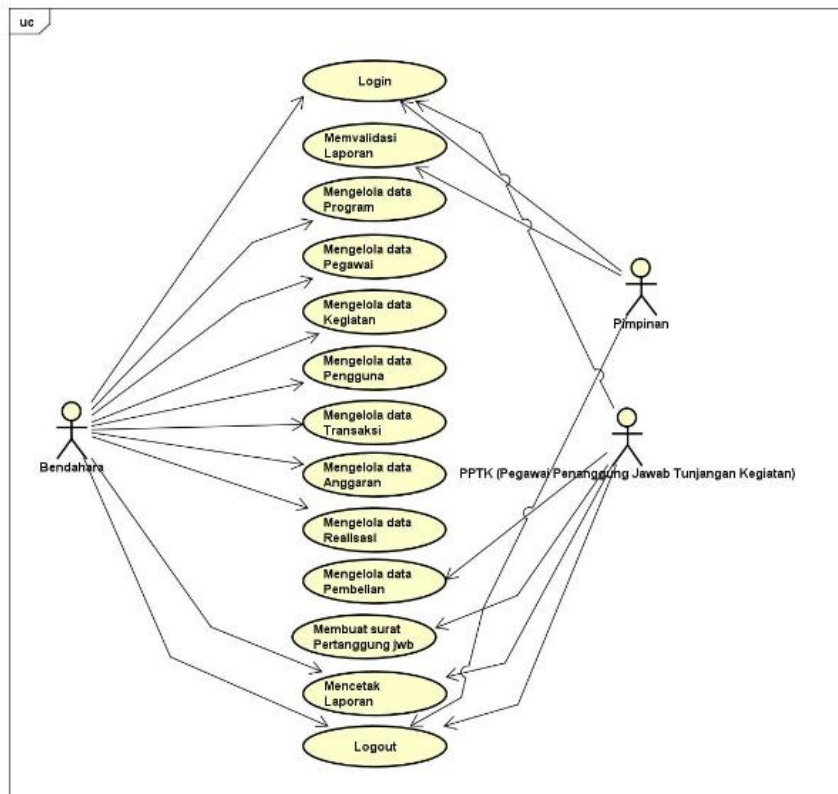
Bagan alir dokumen sistem informasi pengelolaan keuangan, menjelaskan mulai dari PPTK, Bendahara Sampai Kepala Kantor system yang berjalan diperusahaan tersebut sesuai dengan apa yang dikerkan didalam sampai dengan akhir sistem. yang dilihat pada gambar 1 berikut ini :



Gambar 1. BAD Sistem Berjalan

2.2. Use Case Diagram

Berikut adalah rancangan *use case diagram* dari sisitem informasi akuntansi pengendalian kas, dapat dilihat pada gambar 2 berikut.



Gambar 2. Rancangan Use Case Diagram

3. IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Sistem

Implementasi sistem ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembuatan alur *user*, sehingga mengetahui hasil apakah sistem yang telah dibuat mencapai tujuan yang diinginkan. Pembahasan tentang implementasi aplikasi sistem informasi akuntansi pengendalian arus kas menggunakan metode *direct cash flow* adalah sebagai berikut :

a. Implementasi Form Login

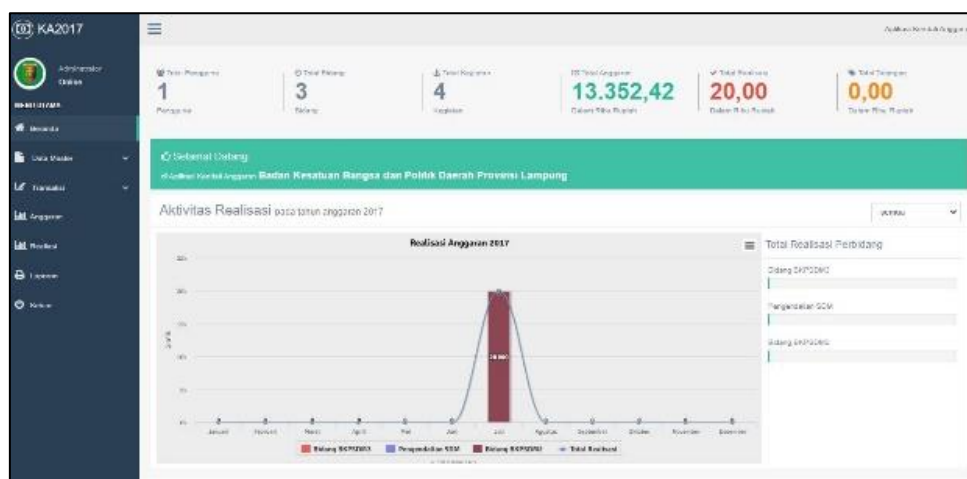
Form login berfungsi untuk keamanan untuk melindungi keluar masuknya pengguna dari sistem dimana Pimpinan, PPTK, Bendahara diminta untuk memasukan *username* dan *password* yang telah ditentukan sebelumnya. *Form login* dapat dilihat dari gambar 3 berikut ini :



Gambar 3. Implementasi *Login*

b. Implementasi *Form Dashboard*

Rancangan *form dashboard* ini adalah sebuah rancangan yang dapat diakses setelah beberapa pengguna telah melakukan *login* disistem dan tampilan ini dapat melihat beberapa aktivitas yang dapat dilakukan oleh pengguna dengan ini dapat diakses Pimpinan, PPTK dan Bendahara gambar 4 dapat dilihat dibawah ini:



Gambar 4. Implementasi Dashboard

c. Keterangan dan Fungsi Menu dan Submenu *dashboard*

Rancangan *form dashboard* terdiri beberapa *submenu* dan fungsi yang dapat digunakan oleh pengguna yang mana setiap *step* akan ada fungsi masing-masing, langkah pertama adalah menudatamaster yang berisi beberapa Menu dan *Submenu* dibawah ini :

A) Menu Data Master :

1. Data Pegawai yang nantinya pengguna dapat menambahkan data pegawai yang akan ditampilkan dihalaman *dashboard* yang berfungsi untuk mengetahui siapa pengguna dan karyawan yang ada di perusahaan tersebut.
2. Data Program yang berfungsi untuk menambahkan data program yang akan dirancang oleh perusahaan dalam aktivitas dan anggarannya.
3. Data Kegiatan berfungsi untuk menampilkan data kegiatan yang akan dijalankan di sebuah kegiatan tersebut dan berelasi dengan data program.
4. Data Belanja berfungsi untuk menambahkan data belanja di perusahaan tersebut dengan begitu setiap pengguna dapat menginputkan belanja yang terintegrasi dalam *database* sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan.
5. Data Bidang berfungsi dalam menginputkan data dalam perusahaan tersebut sehingga pengguna mengetahui masing-masing bidang yang tersedia.
6. Data Pengguna berfungsi untuk menambahkan data pengguna yang tampil di layar *dashboard*.

B) Menu Transaksi

1. Tahun Anggaran yang berfungsi dalam menambahkan data anggaran setiap tahunnya pengguna dapat mengetahui pada tahun itu aktif atau tidak
2. PPTK yang berfungsi dalam menambah data pegawai disetiap pegawai yang masuk dan keluar dan dapat diatur melalui sistem ini.

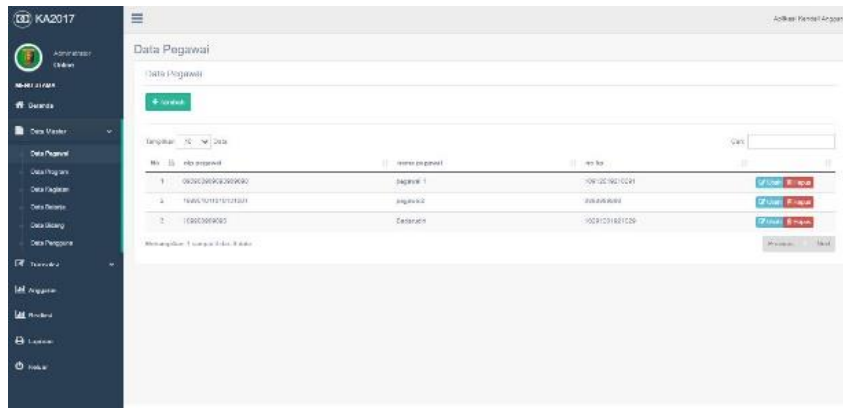
C) **Menu Anggaran** berfungsi mengatur setiap anggaran pertahun dalam menampilkan data PPTK atau pegawai salah satu dan pegawai yang berbelanja pada tahun tersebut.

D) **Menu Realisasi** berfungsi mengatur setiap Realisasi pertahun dalam menampilkan data PPTK atau pegawai salah satu dan pegawai yang berbelanja pada tahun tersebut.

E) Menu Laporan Mengatur beberapa laporan dari seluruh aktivitas yang ada di sistem, dalam bentuk PDF.

d. Implementasi Tampilan Data Pegawai

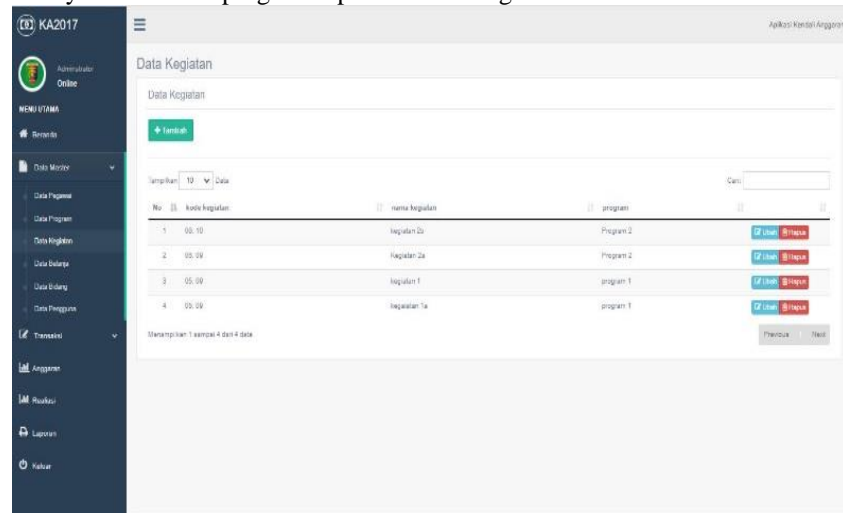
Form Pegawai berfungsi untuk Bendahara diminta untuk memasukan data pegawai yang telah ditentukan sebelumnya. *Form* data pegawai dapat dilihat dari gambar 5 berikut ini :



Gambar 5. Implementasi Tampilan Data Pegawai

e. Implementasi Data Program

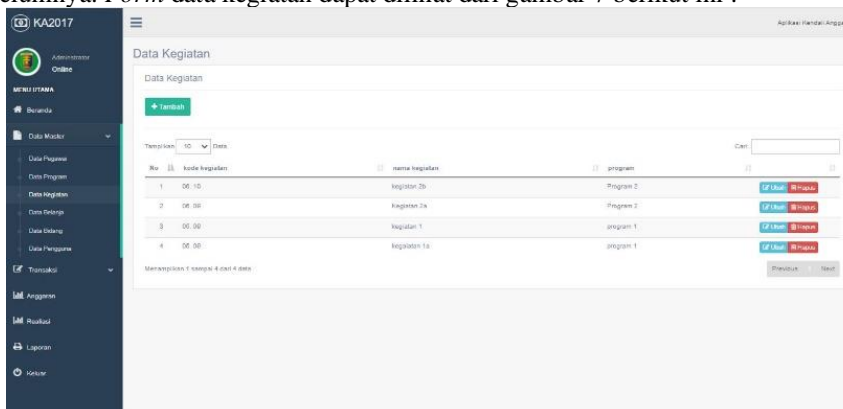
Form Program berfungsi untuk Bendahara diminta untuk memasukkan data program yang telah ditentukan sebelumnya. Form data program dapat dilihat dari gambar 6 berikut ini :



Gambar 6. Implementasi Data Program

f. Implementasi Data Kegiatan

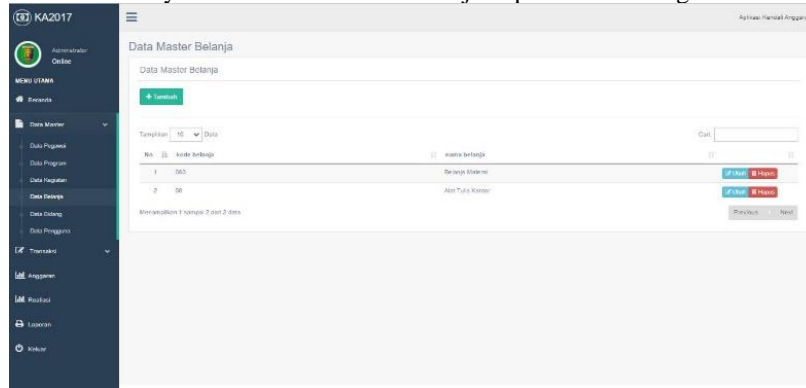
Form data Kegiatan berfungsi untuk Bendahara diminta untuk memasukkan data kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Form data kegiatan dapat dilihat dari gambar 7 berikut ini :



Gambar 7. Implementasi Data Kegiatan

g. Implementasi Tampilan Data Master Belanja

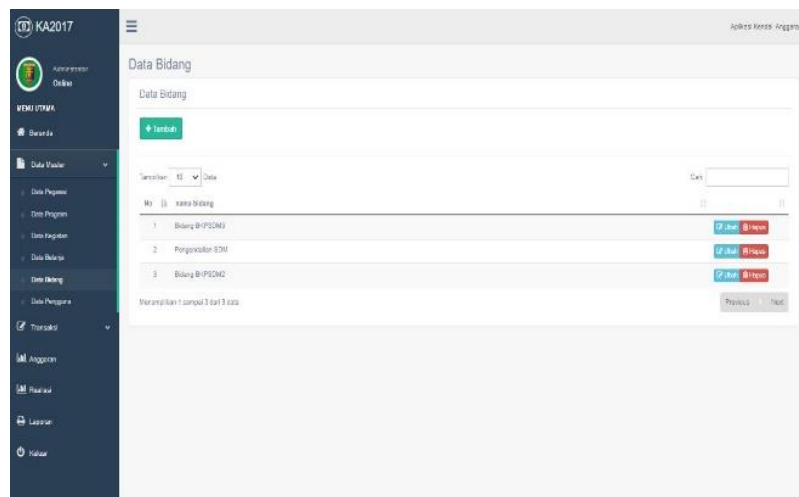
Form data master belanja berfungsi untuk Bendahara diminta untuk memasukan data Master Belanja yang telah ditentukan sebelumnya. *Form* data Master Belanja dapat dilihat dari gambar 8 berikut ini :



Gambar 8. Implementasi Tampilan Data Master Belanja

h. Implementasi Tampilan Data Bidang

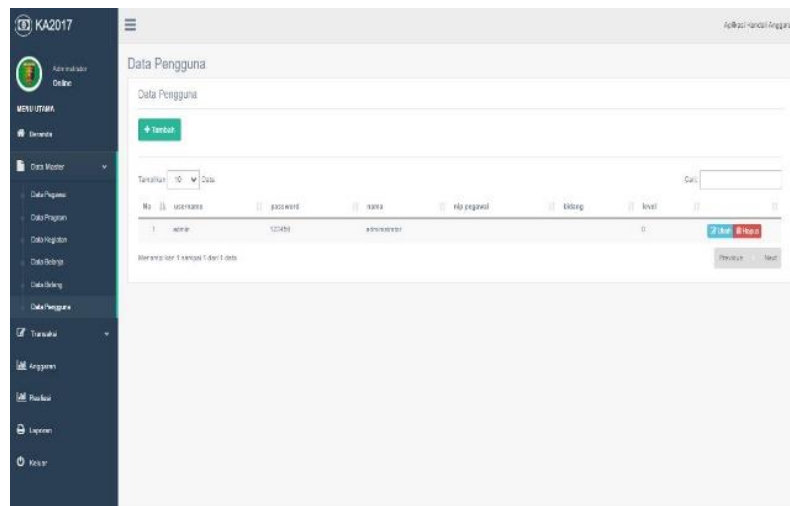
Form data bidang berfungsi untuk Bendahara diminta untuk memasukan data bidang yang telah ditentukan sebelumnya. *Form* data bidang dapat dilihat dari gambar 9 berikut ini :



Gambar 9. Implementasi Tampilan Data Bidang

i. Implementasi Tampilan Data Pengguna

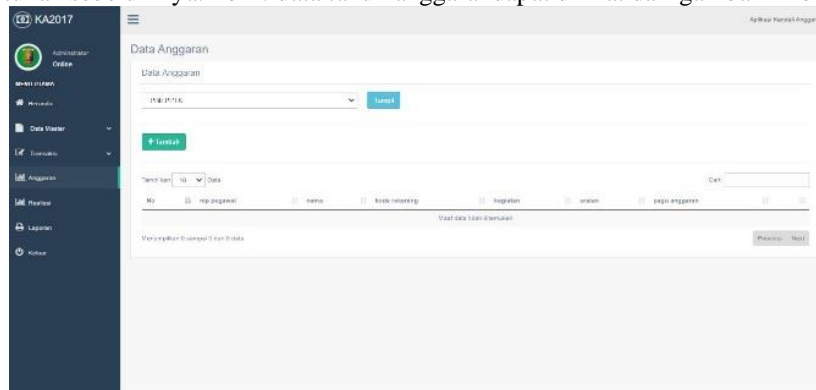
Form data pengguna berfungsi untuk Bendahara diminta untuk memasukan data pengguna yang telah ditentukan sebelumnya. *Form* data pengguna dapat dilihat dari gambar 10 berikut ini :



Gambar 10. Implementasi Tampilan Data Pengguna

j. Implementasi Tampilan Data Tahun Anggaran

Form data tahun anggaran berfungsi untuk Bendahara diminta untuk memasukan data tahun anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. *Form* data tahun anggaran dapat dilihat dari gambar 11 berikut ini :



Gambar 11. Implementasi Tampilan Data Tahun Anggaran

k. Implementasi Tampilan Data PPTK

Form data PPTK berfungsi untuk Bendahara diminta untuk memasukan data PPTK yang telah ditentukan sebelumnya. *Form* data PPTK dapat dilihat dari gambar 12 berikut ini :



Gambar 12. Implementasi Tampilan Data PPTK

l. Implementasi Tampilan Data Realisasi

Form data *Realisasi* berfungsi untuk Bendahara diminta untuk memasukan data *Realisasi* yang telah ditentukan sebelumnya. Form data *Realisasi* dapat dilihat dari gambar 13 berikut ini :

Gambar 13. Implementasi Tampilan Data *Realisasi*

m. Implementasi Tampilan Data Laporan

Form data Kegiatan Laporan berfungsi untuk Bendahara diminta untuk memasukan data Laporan yang telah ditentukan sebelumnya bendahara dapat mencetak laporan keuangan disistem ini. Form data laporan dapat dilihat dari gambar 14 berikut ini :

Gambar 14. Implementasi Tampilan Data Laporan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan yaitu aplikasi yang dikembangkan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Lampung, yang dibuat dengan *Codeigniter 3* dengan *databases mysqlgog* sehingga mempermudah pihak perusahaan dalam melakukan pengelolaan data keuangan distudi kasus tersebut, dan mengurangi kesalahan dalam melakukan input data, serta perhitungan keluar masuknya uang dalam bentuk banyak dapat terkontrol oleh sistem yang diusulkan sehingga mengurangi kecurangan saat pembelian barang atau penerimaan barang.

REFERENSI

- [1] Hayati, E. N. (2014). *Supply Chain Management (SCM) Dan Logistic Management*. Jurnal Ilmiah Dinamika Teknik, 8 (1), 25–34.
- [2] Makaluas, J. L., & Afandi, D. (2016). *Analisis Pelaporan Dan Pengungkapan Aktiva Tetap Di PT. Kemilau Nur Sian*. Jurnal EMBA, 4(1), 364–374.
- [3] Ponidi, & Fitrajaya, S. (2015). *Perancangan Sistem Informasi Pendataan Penduduk Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall Pada Kecamatan Gadingrejo*. Jurnal TAM (Technology Acceptance Model), 4, 68–74.

-
- [4] Pontoh, E. L., Morasa, J., & Budiarmo, N. S. (2016). *Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Terhadap Aktiva Tetap Berdasarkan PSAK No. 16 Tahun 2011 Pada PT. Nichindo Manado Suisan*. Jurnal Emba, 4(3), 68–77.
- [5] Prasetyo, D. Y. (2015). *Sistem Informasi Manajemen Hotel Arrahman Tembilahan Berbasis Web (Online) Pada Hotel Arrahman Tembilahan*. SISTEMASI, 4(3), 25–34.
- [6] Purwandari, N. (2016). *Perancangan Sistem Pengiriman Logistik Pada Perusahaan Manufaktur*. I-Statement, 2(2), 51–63.